

BAB II

SEJARAH ALIANSI JEPANG-AMERIKA SERIKAT DAN ANCAMAN DARI KOREA UTARA TERHADAP JEPANG

Menjadi sebuah negara maju tidak lantas membuat Jepang menjadi negara yang aman – aman dan bisa hidup secara damai tanpa ada permasalahan. Dimana berbagai ancaman bisa saja muncul darimana saja, termasuk dari negara – negara disekitar Jepang seperti Korea Utara dan China. Dan disisi lain sistem keamanan Jepang atau militer Jepang bisa dikatakan tidak bisa bekerja dengan sempurna karena Jepang sendiri keamanannya berada dibawah bayang – bayang Amerika Serikat, sehingga jika terjadi sesuatu pada Jepang, maka mau tidak mau Jepang harus meminta bantuan pada Amerika Serikat. Disini penulis akan memaparkan sejarah singkat hubungan Jepang dan Amerika Serikat, serta ancaman ancaman yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Jepang.

A. Dinamika Hubungan Amerika Serikat – Jepang Dan Isu Keamanan Kawasan Asia Timur

Jepang saat ini dikenal dengan negara maju yang mampu bersaing dengan negara – negara barat dan bahkan Jepang mampu memberikan pengaruhnya terhadap dunia internasional. Namun sebelum menjadi seperti sekarang ini, dulu Jepang adalah negara yang terisolasi dari dunia luar, Jepang kehilangan kontak dengan negara – negara luar hampir selama kurang lebih dua abad. Hingga setelah Jepang mulai menyadari bahwa Jepang adalah negara yang tertinggal, Jepang mulai membuka diri dan mau untuk menerima pengaruh pengaruh dari luar, tidak butuh waktu lama bagi Jepang dalam mempelajari pengaruh – pengaruh dari luar, dan hal tersebut mampu memberikan dampak yang baik bagi Jepang, dan mampu membawa Jepang menjadi salah satu

negara di Asia yang mampu meniru bangsa Eropa baik dalam perkembangan ekonomi, sosial, dan bahkan militer.

Karena kemajuan Jepang tersebut pada akhirnya membawa Jepang untuk terlibat dalam Perang Dunia I. Dan keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia I, berhasil membawa Jepang untuk menjadi salah satu negara pemenang dari Perang Dunia I. Sehingga kemenangan Jepang dalam Perang Dunia I tersebut, membawa Jepang untuk kembali ikut dalam Perang Dunia II, namun hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dialami Jepang pada Perang Dunia I, pada Perang Dunia II ini Jepang mengalami kekalahan. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah dua kota terpenting Jepang di bom atom oleh Sekutu yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Dimana Hiroshima dan juga Nagasaki merupakan kota industri terbesar yang ada di Jepang. (Firdaus, 2014)

Perang Dunia II adalah sebuah perang global yang berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak negara yang tergabung dalam Sekutu dan Poros. Perang ini merupakan perang terluas dalam sejarah yang melibatkan lebih dari 100 juta orang dari berbagai pasukan militer. Salah satu dari anggota dari Poros adalah Jepang. Kekaisaran Jepang berusaha mendominasi Asia Timur dan sudah memulai perang dengan Republik Tiongkok pada tahun 1937. Penaklukan Jepang ditandai dengan pada 6 Agustus dan 9 Agustus, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Pada 9 Agustus, Uni Soviet melancarkan penyerbuan mendadak ke koloni Jepang di Manchuria (Manchukuo) yang melanggar Pakta Netralitas Soviet-Jepang. Menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945 menandai akhir Perang Dunia II.

Angkatan Laut Kekaisaran Jepang secara efektif sudah tidak ada sejak Agustus 1945, sementara invasi Sekutu ke Jepang hanya tinggal waktu. Walaupun keinginan untuk melawan hingga titik penghabisan dinyatakan secara terbuka,

pemimpin Jepang dari Dewan Penasihat Militer Jepang secara pribadi memohon Uni Soviet untuk berperan sebagai mediator dalam perjanjian damai dengan syarat-syarat yang menguntungkan Jepang. Sementara itu, Uni Soviet juga bersiap-siap untuk menyerang Jepang dalam usaha memenuhi janji kepada Amerika Serikat dan Inggris di Konferensi Yalta. Isu penyerahan diri Jepang kepada sekutu tertuang dalam Potsdam Declaration (Postdam Declaration| The Birth of The Constitution of Japan) pada tanggal 26 Juli 1945. Kaisar Hirohito menyatakan penyerahan diri Jepang kepada sekutu pada 14 Agustus 1945 Total kerugian materi yang diderita Jepang begitu besar. Kerusakan akibat bom atom sekutu sangat membahayakan lingkungan mengingat radiasi dari bom atom tersebut.

Perang Dunia II diakhiri dengan rangkaian kekalahan Jepang yang berujung pada pendudukan Amerika Serikat di Jepang. Pasca berakhirnya okupasi Amerika Serikat di Jepang, hubungan kedua negara tetap terjalin dan saling berusaha mengurangi tensi. Bersamaan dengan keluarnya SCAP dari Jepang, kedua negara melakukan kesepakatan yang menjadi cikal bakal kerjasama bilateral dibidang keamanan. Melalui kerjasama bilateral yang disepakati, lahirlah sebuah aliansi kuat antara Jepang dan Amerika Serikat. Pada 8 September 1951, antara Jepang dan Amerika Serikat menyepakati dua perjanjian yakni San Fransisco Treaty dan Japan-US Security Treaty.

1. Dinamika Amerika Serikat – Jepang

Sejarah terbentuknya kerja sama militer antara Jepang – Amerika Serikat dimulai setelah Jepang telah menyerah kepada sekutu, Jepang menyerah setelah dua kota pusat industri Jepang diluluh lantahkan oleh sekutu, sehingga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup Jepang. Dan karena kekalahan Jepang tersebut, membuat Jepang harus memenuhi tuntutan – tuntutan dari para

pemenang Perang Dunia II, yaitu Jepang harus berada dibawah kendali Amerika Serikat melalui pemerintahan sementara SCAP (*Supreme Commander Alliance on Pacific*) dibawah perwakilan Jendral Doughlas MacArthur.

Dan pada tanggal 8 September 1951 Jepang bersedia untuk menandatangani Perjanjian San Fransisco (*Treaty of San Fransisco*) dimana pada perjanjian tersebut ditanda tangani oleh 49 negara, dan pada perjanjian tersebut berisi pernyataan secara resmi berakhirnya Perang Dunia II, dan mengakhiri kedudukan Jepang sebagai kekuatan imperialis. (Hara, 2001)

a. Era Sebelum Perang Dunia dan Terjadi Perang Dunia II

Dalam Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1939 – 1945, Jepang terjun langsung di dalamnya bersama dengan dua sekutunya, Jerman dan Italia. Perang Dunia II resmi dimulai pada tanggal 1 September 1939, yaitu saat Jerman menginvasi Polandia. Perang ini pada mulanya berpusat di Eropa, dimana Inggris dan sekutu – sekutunya mulai kewalahan menghadapi serangan dari Jerman dan Italia. Medan peperangan pun mulai meluas ke wilayah Asia Pasifik, bermula dari pengeboman Pangkalan Laut Amerika yang berada di Pearl Harbor oleh Jepang. (Hikmah, 2012)

Ketika Perang Dunia Pertama terjadi, tren utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat masih berupa non-intervensi. Namun ketika Perang Dunia Kedua terjadi Amerika Serikat merubah kebijakan luar negerinya untuk aktif mendukung sekutu. Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat kala itu, memimpin dibuatnya kebijakan “Arsenal of Democracy”, dimana Amerika Serikat akan memberikan bantuan dana dan perlengkapan militer, tanpa mengirim pasukan Amerika Serikat untuk ikut langsung berperang.

Namun ketika Jepang menyerang “Pearl Harbor” , Presiden Roosevelt menyatakan Amerika Serikat akan berperang langsung dengan Jerman, Jepang, dan Italia. Presiden Roosevelt mengirimkan pasukan Amerika Serikat ke Teluk Pasifik untuk melawan Jepang, ke Afrika Utara untuk melawan Italia dan Jerman, dan terakhir di Eropa untuk melawan Jerman. Amerika Serikat pun didukung dengan perkembangan industri militer drastis di dalam negeri yang melahirkan bom atom yang dijatuhkan di Jepang. Bersama dengan sekutu, Amerika Serikat pun memenangkan Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat merasakan dampak paling kecil dari Perang Dunia Kedua diantara negara sekutu, dan juga dengan tumbuh industri, Amerika Serikat pun naik menjadi negara adidaya.

Pada awal perang, nampak pihak Jepang berada pada posisi yang afensif. Tapi sejak pertengahan tahun 1942, situasi perang mulai berubah, tepatnya ketika Jepang mengalami kekalahan dalam perang laut di Midway tanggal 3 sampai 6 Juni 1942. Penyebab kekalahan ini tidak lain adalah karena industri Amerika saat itu difokuskan untuk memenuhi keperluan perang. Tidak sebanding dengan industri perang Jepang karena tidak mendapatkan pasokan bahan mentah yang diperlukan untuk keberlangsungan industri. Faktor penentu lain adalah terdapatnya perbedaan yang mendalam dalam tubuh angkatan perang Jepang. Semenjak itu serangan defensif yang dilakukan oleh Sekutu menyebabkan posisi Sekutu mulai semakin maju ke wilayah Jepang.

Di Pasifik Barat Daya, pasukan di bawah Jendral Douglas Mac Arthur bergerak menuju Guadalcanal (Februari 1943) melalui Morotai ke Leyte (Desember 1944). Luzon diserang pada Januari 1945, dan Manila berhasil direbut pada bulan berikutnya. Kemudian pasukan yang dipimpin oleh Laksamana Chester Nimitz berhasil merebut pulau-pulau kecil yang kemudian dijadikan pangkalan untuk bergerak maju. Kemudian penaklukan dilakukan di Kepulauan Marshall pada

awal tahun 1944, lalu Saipan di Mariana pada musim panas berikutnya, kemudian Guam dan Palau dalam beberapa pekan. Kedua pasukan Mac Arthur dan Nimitz bertemu di Filipina tahun 1945. Mac Arthur berhasil mengalahkan angkatan darat Jepang di situ, dan Nimitz menghancurkan sebagian dari apa yang tersisa dari armada Jepang. Dengan jarak hanya 330 mil dari Okinawa, Tokyo dapat dijangkau oleh pesawat pembom berat dari Amerika. (Beasley., 2003)

Kemudian mulailah terbuka mata rakyat Jepang, bahwa mereka tidak hanya berada diambang kekalahan, tetapi juga diambang kehancuran. Pada saat Jepang sedang dalam suasana kalut akibat serangan udara dan laut sekutu, pada bulan Juli 1945 di Potsdam sedang berunding para kepala pemerintahan negara-negara sekutu yaitu : H.S. Truman (Amerika), Stalin (Uni Soviet), Churchill (Inggris) dan Chiang Kai Sek (Cina). Dalam perundingan ini, pada tanggal 26 Juli dikeluarkan sebuah Ultimatum kepada pemerintah Jepang untuk menyerah pada pihak sekutu, akan tetapi Jepang menolak untuk menerima ultimatum ini.

Sebagai akibatnya, tanggal 6 Agustus 1945 Hiroshima dihancurkan dengan bom atom yang pertama kali dalam sejarah umat manusia, berikutnya tanggal 9 bulan yang sama, Nagasaki mengalami hal yang serupa. Dengan kejadian ini, Kaisar Jepang terpaksa menyuruh kabinet atas namapemerintahan untuk menerima persyaratan yang diajukan oleh Sekutu. Tanggal 15 Agustus 1945, berkumandanglah rekaman suara Kaisar pada seluruh rakyat Jepang yang berisi pernyataan pemerintah Jepang untuk mengakhiri perang dan menyerah pada sekutu. Jepang telah menyerah, walaupun belum ada satu orang tentara sekutu yang menjejakkan kakinya ke daratan Tokyo. Sebagai tindakan lanjut dari keputusan pemerintahan tadi, tanggal 2 September 1945 dilakukan penandatanganan penyerahan militer Jepang kepada sekutu di atas geladak kapal Missouri yang berlabuh di teluk Tokyo. (WATI, 2019)

b. Pasca Perang Dunia II

Secara teoritis, negara merdeka bebas menentukan seluruh kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional primernya, termasuk dalam hal ini kebijakan yang menyangkut pertahanan keamanan, tanpa campur tangan negara lain. Namun yang terjadi dengan Jepang adalah sesuatu yang di luar kebiasaan umum, karena sejak 1950-an yaitu ketika pendudukan sekutu terhadap Jepang telah berakhir, Jepang tetap berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, terutama dalam penentuan kebijakan pertahanan keamanan. Selain negara merdeka, dewasa ini Jepang juga merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian termaju di dunia. Namun, kemajuan ekonomi tersebut tidak diikuti oleh pembangunan militer sebagaimana dilakukan oleh negara-negara maju lainnya. Prosentase dari Gross National Product (GNP) untuk anggaran pertahanannya adalah paling kecil dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti Jerman, Inggris, Prancis bahkan dari negara-negara Asia seperti Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Anggaran pertahanannya tidak pernah lebih dari 1% dari GNP sampai tahun 1984.

Menyerahnya Jepang menjadi pertanda berakhirnya Perang Dunia II yang berlangsung kurang lebih selama lima tahun. Sebelum Jepang menyerah, pada 8 Mei 1945, Jerman telah terlebih dahulu menyerah sekaligus mengakhiri Perang Dunia II di front Eropa. Di sisi lain, Jepang menolak memenuhi semua tuntutan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat karena ingin menuntaskan misinya. Pada 16 Juli 1945, para pemimpin Sekutu bertemu dalam Konferensi Potsdam, Jerman. Perang melawan Jepang merupakan salah satu dari berbagai isu yang dibicarakan dalam konferensi itu. Akhirnya, para pemimpin Sekutu memutuskan mengeluarkan pernyataan yang disebut Deklarasi Potsdam yang menegaskan Jepang harus menyerah tanpa syarat. Pemerintah Jepang menolak dan tak menerima dari ultimatum dari Sekutu tersebut.

Sehari kemudian, surat-surat kabar Jepang melaporkan, negeri itu menolak isi Deklarasi Potsdam. Sebelumnya, selebaran berisi pernyataan Deklarasi Postdam dijatuhkan pesawat-pesawat Sekutu di atas wilayah Jepang. Sementara itu, di gurun pasir New Mexico, AS sebuah proyek membuat senjata pemusnah massal dengan sandi Proyek Manhattan sedang digarap. Hasil dari proyek ini adalah dua bom atom Little Boy dan Fat Man yang kemudian digunakan untuk mengakhiri perang. Pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Superfortress berjudul "Enola Gay" menjatuhkan bom atom Little Boy di Hiroshima. Amerika Serikat memilih Hiroshima yang kala itu merupakan pusat industri dan markas militer terbesar. Selanjutnya, pada 9 Agustus 1945, pesawat berjudul Bock's Car menjatuhkan bom Fat Man di kota Nagasaki.

Nagasaki merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Jepang Selatan dan menjadi kota penting semasa perang karena memiliki banyak aktivitas industri, termasuk artileri, kapal perang, perlengkapan militer, dan material perang. Akibatnya, dua kota besar Jepang luluh lantah dengan puluhan ribu orang menjadi korban tewas dan luka. Setelah dua kota itu dijatuhi bom atom, Pemerintah Jepang belum bisa menentukan langkahnya. Tak adanya reaksi pemerintah Jepang membuat Sekutu berencana melakukan invasi militer. Kapal-kapal perang AS bahkan sudah mulai menembakkan meriam mereka ke pantai Jepang.

Pada 13 Agustus, sejumlah pesawat B-29 dikirim untuk menjatuhkan selebaran-selebaran di atas Jepang. Selebaran ini berisi tawaran kepada Jepang untuk menyerah kepada Sekutu. Pada 14 Agustus 1945, pemerintah Jepang menggelar pertemuan dengan beberapa perwira militer senior untuk segera menentukan sikap. Kehancuran yang menimpa Hiroshima dan Nagasaki membuat pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk menyerah dan mengakhiri perang. Namun, sejumlah perwira militer belum mau menyerah

sehingga timbul gejolak antara militer dan pemerintah yang memutuskan untuk menyerah. Hasilnya, pemerintah Jepang akhirnya mengirimkan surat berupa langkah langkah yang akan diambilnya ke kedutaan besar negeri itu di Swiss dan Swedia. Isi surat itu pada dasarnya adalah menerima syarat-syarat penyerahan yang ditentukan Sekutu. Akhirnya, pesan yang dikirim Jepang diterima Sekutu. Akhirnya upacara penyerahan Jepang digelar pada 2 September 1945 di atas kapal tempur Amerika Serikat USS Missouri. Dokumen menyerahnya Jepang yang ditandatangani para pejabat pemerintahan Jepang secara resmi mengakhiri Perang Dunia II. (PRATAMA, 2018)

Semenjak tahun 1946, setelah ditakukan oleh Amerika Serikat, Jepang memberlakukan Konstitusi Baru. Dimana dalam Pasal 9 dinyatakan bahwa Jepang menjadikan dirinya sebagai negara damai dan menolak penggunaan kekerasan (perang) dalam penyelesaian sengketa. yang menyatakan bahwa Jepang merupakan negara yang cinta damai sehingga tidak diperbolehkan menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan luar negerinya serta melarang Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata atau militer. Perjanjian ini sebagian besar didasarkan pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu isi dari perjanjiannya adalah Kepulauan Jepang di bawah pengawasan Amerika Serikat. Artinya pembubaran angkatan bersenjata Jepang dan ketergantungan Jepang pada aliansinya dengan Amerika Serikat Jepang juga tidak menjalankan haknya untuk berperang dan membangun angkatan bersenjata untuk berperang. Jepang hanya diberikan otoritas untuk membela pertahanannya sendiri. dimana pada Kondisi ini mengharuskan Jepang untuk dapat menjaga perdamaian dengan kolaborasi internasional sebagai dasar keamanan nasional melalui stabilisasi kehidupan rakyat dan membangun kapabilitas pertahanan serta kerjasama dengan Amerika Serikat. (Sigur, 1992)

Setelah Jepang ditaklukan oleh Arnerika pada Perang Dunia II, ia telah melakukan berbagai reformasi untuk mengubah dirinya dari negara yang memiliki kekuatan militer menjadi negara non- militer. Reformasi yang dilakukan, dimana banyak dipengaruhi oleh Amerika sebagai negara yang menduduki Jepang (Occupation Regime), tidak terbatas hanya pada bidang ekonomi dan kehidupan sosial tetapi juga dibidang hukum.Salah satu pengaruh Arnerika pada reformasi dibidang hukum adalah perubahan terhadap konstitusi Jepang.

Pada masa sebelum perang, konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi Meiji yang oleh Amerika dinilai sebagai salah satu penyebab agresi yang dilakukan oleh Jepang, dan karenanya konstitusi tersebut perlu untuk diamendir. Salah satu pasal yang diatur dalam konstitusi baru, yang mulai berlaku tahun 1946, adalah kehendak Jepang untuk menjadikan dirinya sebagai negara yang cinta damai dan menolak penggunaan kekerasan (perang) dalam penyelesaian sengketa. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 9, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) *Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling disputes.*
- b) *In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the State will not be recognized.*

Adanya ketentuan ini dalam konstitusi baru Jepang membuat konstitusi ini sering disebut sebagai "Konstitusi Damai" atau "Konstitusi Pasif". (Juwana, 1992)

Demi keamanan dunia, Sekutu juga melakukan perubahan terhadap konstitusi Jepang, yang mengisyaratkan agar Jepang tidak lagi mengembangkan kekuatan militer di

kemudian hari. Konstitusi baru tersebut menetapkan tiga prinsip dasar yang salah satunya menegaskan tentang sikap negara Jepang yang cinta damai. Untuk melaksanakan prinsip yang ketiga tersebut, pada artikel 9 konstitusi 1947, secara tegas disebutkan tentang pelarangan penggunaan militer ke luar negeri berdasarkan keputusan sendiri.

Beberapa kebijakan nasional pertahanan Jepang lainnya adalah memajukan kebijakan pertahanan eksklusif, tidak menjadi kekuatan militer yang dapat mengancam dunia, tidak mengembangkan senjata nuklir, mengintensifkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat serta membangun kapabilitas defensif dalam batas-batas tertentu. Sebelum perjanjian San Fransisco ada dan disetujui di tahun 1947 ada konstitusi Jepang (Konstitusi Damai) Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu sesuai Perang Dunia II dan direncanakan untuk menggantikan sistem monarki absolut yang militeristik dengan suatu bentuk demokrasi liberal.

Saat ini, dokumen konstitusi ini bersifat kaku. Isi konstitusi ini memiliki karakteristik utama dan terkenal karena tidak memberikan hak untuk memulai perang yang terdapat pada Pasal 9 dan dalam penjelasan yang lebih ringkas pada ketetapan kedaulatan rakyat yang berhubungan dengan peranan kekaisaran. Pada Pasal 9 konstitusi 1947 dijelaskan bahwa pemerintah Jepang menolak adanya perang. Pasal 9 tersebut berbunyi:

“Bercita-cita tulus untuk perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, orang Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa internasional. Dalam rangka mencapai tujuan dari paragraf sebelumnya,

darat, laut, dan angkatan udara, serta potensi perang lainnya, tidak akan dipertahankan. Hak untuk bermusuhan negara tidak akan diakui”

Keberadaan pasal pada konstitusi tersebut membuat Jepang tidak memiliki kekuatan militer dan pertahanan yang kuat bagi negaranya. Hal ini yang kemudian membuat Jepang lebih fokus pada bidang ekonomi hingga membuat Jepang memiliki ekonomi yang sangat maju hingga saat ini. Contoh yang riil kerjasama atau aliansi yang dilakukan oleh kedua negara adalah Amerika Serikat sendiri mempunyai wilayah di daerah teritorial Jepang yang menerima keberadaan militer asing di wilayah berdaulat mereka. Amerika Serikat menempatkan pangkalan militernya di prefektur Okinawa yang kemudian dikatakan sebagai sebagai fasilitas penjaga stabilitas perdamaian internasional, namun pada kenyataannya fasilitas ini digunakan sebagai media untuk meningkatkan kekerasan dengan senjata atas nama perdamaian. (Zeijden, 2009)

Dalam perjanjian tersebut juga disebutkan bahwa kepulauan Jepang berada dibawah pengawasan Amerika Serikat. Dimana angkatan bersenjata Jepang dibubarkan dan Jepang juga tidak diperbolehkan untuk berperang dan membangun angkatan bersenjata untuk berperang. Kebijakan – kebijakan nasional pertahanan Jepang lainnya seperti memajukan kebijakan pertahanan eksklusif, Jepang tidak diperbolehkan memiliki militer yang dapat mengancam dunia, Jepang tidak diperbolehkan untuk mengembangkan senjata nuklir, mengintensifkan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat serta membangun kapabilitas defensif dalam batas-batas tertentu. Sebelum perjanjian San Fransisco ada dan disetujui di tahun 1947 ada konstitusi Jepang (Konstitusi Damai) Konstitusi ini ditulis ketika Jepang berada di bawah pendudukan Sekutu seusai Perang Dunia II.

Jepang memang memiliki bentuk fisik yang kecil jika dibandingkan dengan Korea dan Republik Rakyat Cina yang berada di kawasan Asia Timur, Jepang merupakan negara yang terletak dikawasan Asia Timur. Secara geografis Jepang terletak di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, letak geografis yang tidak dapat dikatakan strategis karena sangat rentan terhadap bencana alam, dan sumber daya alam yang minim.

Namun Jepang dapat mempertahankan posisinya di dunia internasional sebagai negara industri dengan kekuatan ekonominya dan keahliannya dalam bidang teknologi sehingga Jepang mendapatkan sorotan dari negara-negara lain dan dijuluki Macan Asia. Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor dua setelah Amerika Serikat, urutan tiga besar dalam keseimbangan kemampuan berbelanja, berada di peringkat ke-4 negara pengekspor terbesar dan peringkat ke-6 negara pengimpor terbesar di dunia dalam perdagangan luar negeri, serta penduduknya memiliki standar hidup yang tinggi dengan menempati peringkat ke-8 dalam Indeks Pembangunan Manusia dan angka harapan hidup tertinggi di dunia menurut perkiraan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Namun keadaan berubah ketika negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Utara meluncurkan rudal balistik dan melakukan uji coba nuklir serta Cina yang membangun kapabilitas militer dan meningkatkan alutsistanya.

Hal ini membuat kedua negara berkerjasama sebagai aliansi pertahanan dengan Jepang. Kemajuan ekonomi Jepang tidak selaras dengan sistem pertahanan dan keamanannya yang relatif pasif. Sesuai dengan konstitusi tahun 1947 dan perjanjian San Fransisco di tahun 1951 yaitu terkait dengan penolakan terhadap perang dan sangat menjunjung perdamaian dunia serta seluruh hal yang berbau militer diserahkan oleh Amerika Serikat. Hal ini kemudian memberi batasan bagi pengembangan Pertahanan Jepang dan melarang bagi Jepang untuk mengembangkan kekuatan militer baik darat, laut

maupun udara. Pada konstitusi ini Jepang hanya diperbolehkan bertumpu pada kemampuan beladiri atau JSDF (Japan Self Defence Force). (H, 2014)

Tepat pada 8 September 1951, Jepang dan Sekutu menandatangani Perjanjian San Fransisco di San Fransisco, California, Amerika Serikat. Dan baru pada 28 April 1952, perjanjian ini mulai berlaku efektif. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri Perang Dunia II, menyudahi peran Jepang sebagai kekuatan imperialis, dan mengalokasikan kompensasi bagi warga sipil dan mantan tawanan perang yang menderita akibat kejahatan Jepang di masa perang.

Dari 52 negara peserta konferensi, hanya 49 negara yang menandatangani Perjanjian San Fransisco, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Bolivia, Brasil, Chili, Ekuador, El Salvador, Ethiopia, Filipina, Guatemala, Haiti, Honduras dan Britania Raya. Selain itu, Indonesia, Irak, Iran, Kamboja, Kanada, Irlandia Utara, Kolombia, Kosta Rika, Kuba, Laos, Lebanon, Liberia, Luksemburg, Meksiko, Mesir, Nikaragua, Norwegia, Pakistan, Panama, Perancis, Peru, Republik Dominika, Selandia Baru, Sri Lanka, Suriah, Turki, Uruguay, Venezuela, Vietnam dan Yunani juga masuk daftar negara penandatangan Perjanjian San Fransisco. Demikian seperti dirilis United Nations Treaty Series. Cekoslowakia, Polandia, dan Uni Soviet diketahui menolak menandatangani perjanjian tersebut. Sementara, Filipina dan Indonesia, meski menandatangani perjanjian, namun tidak meratifikasinya.

Dan pada tahun 1951 Jepang menandatangani Aliansi keamanan dengan Amerika Serikat yaitu The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security (Treaty - of - Mutual - Cooperation - and - Security - between - the - United States - and - Japan) yang mulai berlaku bulan April 1952. Untuk menjaga keamanan wilayahnya, khususnya terhadap serangan dari luar, Jepang dipaksa mengadakan aliansi keamanan

dengan Amerika Serikat. Aliansi keamanan tersebut dituangkan dalam The US-Japan Treaty Mutual Cooperation and Security yang ditandatangani tahun 1951 dan berlaku mulai bulan April 1952. Selain alasan keamanan Jepang, aliansi tersebut juga dilatarbelakangi keinginan Sekutu untuk mempertahankan keberadaannya dikawasan Asia, khususnya di Asia Timur, karena pendudukan sekutu akan berakhir pada tahun 1952. Amerika Serikat berkepentingan untuk menjaga agar pengaruh komunis tidak meluas ke negara-negara Asia Pasifik khususnya di kawasan Asia Timur.

Perjanjian tersebut mewajibkan Jepang untuk mengorbankan semua wilayah yang didudukinya sejak 1895, serta memasukkan Jepang ke dalam sistem keamanan Amerika Serikat. Amerika Serikat menandatangani perjanjian berikutnya dengan Jepang pada tahun 1954 yang isinya adalah menyediakan perlengkapan-perengkapan, alat-alat, dan lainnya bagi Jepang. Sebaliknya Jepang menyediakan basis-basis militer dan alat-alat yang diperlukan oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut adalah awal dimulainya babak baru negara Jepang yang tidak mempunyai militer, pertahanan dan keamanan sendiri. (Alfian, 2010)

Sejak saat itu, secara faktual pertahanan Jepang sepenuhnya tergantung pada Amerika Serikat. Ketergantungan tersebut menyebabkan dunia internasional mengkritik Jepang karena di satu sisi Jepang tidak memberikan cukup kontribusi terhadap penjagaan stabilitas dan keamanan internasional, namun di sisi lain Jepang menikmati dan mendapatkan berbagai keuntungan yaitu terjaminnya keamanan jalur-jalur perdagangannya di berbagai belahan dunia. Pada tahap tertentu dunia internasional bahkan menekan Jepang untuk membangun kembali kekuatannya. Sumbangan Jepang secara finansial dirasa tidak cukup dan tidak fair dalam upaya negara-negara untuk menjaga keamanan internasional. Jepang dituntut berpartisipasi sepenuhnya baik secara finansial maupun militer.

Keadaan ini menyebabkan Jepang mengalami dilema antara membangun kekuatan militernya kembali atau tidak. Jika pilihan yang pertama dilakukan maka akan muncul tentangan domestik karena hal itu bertentangan dengan Konstitusi Jepang tahun 1947 yang melarang Jepang untuk membangun kekuatan militernya. Selain itu secara eksternal negara-negara tetangga Jepang juga menentang pembangunan kembali militer Jepang, karena adanya kekhawatiran akan bangkitnya militerisme Jepang yang ekspansif di mana mereka pernah menjadi korbannya. Sebaliknya jika pilihan kedua yang dilakukan maka Jepang akan mendapatkan tekanan yang semakin besar dari banyak negara yang menganggap Jepang adalah free rider dari keamanan internasional yang diupayakan dan dijaga oleh dunia internasional.

Pasal 9 konstitusi 1947 Jepang, membatasi wewenang SDF (Self Defence Force) dengan hanya memiliki kekuatan minimum untuk keperluan mempertahankan diri. Sehingga berakibat keamanan dan survival Jepang sangat tergantung dari jaminan security AS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam “*US-Japan Mutual Security Treaty*” (MST) yang ditandatangani tahun 1951 dan berlaku pada April 1952.

Setelah kekalahan Jepang pada PD II, sesuai Deklarasi Potsdam dan Instruksi GHQ (*General Head Quarter*) tentara Amerika Serikat (AS) mewajibkan pemerintah Jepang untuk membatalkan semua tenaga militer. Instruksi ini menjadi pasal 9 UUD 1947. Maka Jepang memilih jalan sebagai negara berdasarkan pasifism. Tetapi, karena makin tingkatnya perang dingin antara pihak AS dan pihak USSR (*Union of Soviet Socialist Republics*), tentara AS mengubah kebijakan awalnya. AS menganggap Jepang sebagai *front-line* di Asia terhadap negara-negara sosialis (USSR dan *People Republic of China*). Waktu Perang Korea terjadi pada 1950, GHQ menyuruh pemerintah Jepang mendirikan satu unit bersenjata sebagai bagian khusus kepolisian (*Keisatsu Yobitai*). Lalu, pada 1952 unit ini dipisah dari kepolisian dan menjadi pasukan mandiri,

bernama *Hoantai* (*Security force*). Akhirnya pada 1954, *Security Force* menjadi *Jieitai* (Pasukan bela diri), dan ditanggung oleh *National Defence Agency*. Pasukan ini melengkapai pasukan darat, pasukan laut, dan pasukan udara.

Kebanyakan kalangan masyarakat Jepang memandang bahwa aliansi dengan Amerika Serikat masih bernilai penting, hal tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kepentingan pertahanan Jepang, akan tetapi juga bagi perdamaian dan stabilitas regional dan internasional. Bertolak belakang dengan pandangan sebelumnya, kritik serta tantangan-tantangan mengenai aliansi tersebut juga banyak bermunculan, terutama mengenai kecenderungan Jepang untuk semakin terlibat dalam strategi kepentingan Amerika Serikat, nilai signifikan dan netralitas aliansi pasca Perang Dingin, ketimpangan hubungan timbal balik yang telah disepakati kedua negara di mana banyak kalangan yang menilai bahwa hubungan tersebut hanya menguntungkan Jepang, serta pertentangan elit politik Jepang mengenai sah atau tidaknya aliansi, apabila melihat Konstitusi 1947. (Ramazotty, 2014)

Aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat merupakan aliansi yang telah berlangsung sejak tahun 1951 dan sampai saat ini masih berlangsung. Kedua negara belum menyatakan untuk mengakhiri aliansi. Dalam perjalanannya, aliansi mengalami beberapa pembaharuan-pembaharuan penting. Beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Jepang-Amerika Serikat menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dan kerjasama baru. *Security Treaty (U.S.-Japan Security Treaty)* tahun 1951 direvisi dengan terbentuknya *Japan-US Security Treaty 1960, Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United States of America*. Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1978 juga direvisi dengan terbentuknya Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat tahun 1997. Sampai saat ini, *Japan-US Security Treaty 1960, Treaty Of Mutual Cooperation And Security Between Japan and The United*

States of America serta Pedoman Kerjasama Pertahanan Jepang-Amerika Serikat masih menjadi landasan dan pedoman bagi Jepang-Amerika Serikat untuk menjalankan aliansi keamanan.

Dalam perkembangannya, aliansi keamanan Jepang-Amerika Serikat mulai memasuki tahapan aliansi yang lebih terkorodinasi dan melalui konsultasi yang lebih jauh. Pada awalnya aliansi fokus untuk pertahanan Jepang, kemudian berkembang dengan upaya untuk berpartisipasi dalam perdamaian dan keamanan internasional, respon terhadap dinamika keamanan di Asia Timur, komitmen untuk membangun perdamaian, serta peningkatan kerjasama di berbagai bidang untuk memperkuat aliansi. (Listiana & Kurniawati, 2013)

2. Isu Keamanan Kawasan Asia Timur

Satu hal terpenting yang perlu disorot dari kawasan Asia Timur adalah ketegangan politik antara kelima negara. Letak permasalahan utamanya terdapat pada perkembangan kekuatan militer China, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Kekhawatiran utama yang muncul dari peningkatan kekuatan militer negara-negara di kawasan dapat dilihat dari dua segi :

- a. Pertama, dari segi kualitas, negara-negara di kawasan mampu memproduksi persenjataan berteknologi tinggi.
- b. Kedua, dari segi kuantitas, negara-negara kawasan dapat memproduksi senjata secara massal.

Kedua kemampuan tersebut dapat diimplementasikan dalam memproduksi persenjataan konvensional, seperti peningkatan kekuatan angkatan laut dan angkatan udara pada kelima negara, maupun kekuatan militer non-konvensional, seperti pengembangan dan ujicoba senjata nuklir, rudal balistik, dan sistem pertahanan anti-rudal. Peningkatan

kekuatan pertahanan kelima negara menimbulkan dilema keamanan di kawasan, dimana peningkatan kekuatan pertahanan yang dijalankan oleh satu negara ditujukan untuk memperlemah pertahanan negara lainnya, sehingga memicu kekhawatiran dan sikap saling curiga satu sama lain. (Hamm, 2001)

Pada dasarnya, terkait stabilitas keamanan di Asia Timur, tidak hanya kelima negara tersebut yang memainkan peranan penting, dimana Russia dan AS merupakan dua negara lainnya yang turut terlibat dalam politik keamanan di kawasan Asia Timur. Namun, arti penting dari kedua negara tersebut berbeda halnya dengan kelima negara yang akan diangkat dalam penelitian, mengingat secara geografis kedua negara tersebut pada dasarnya kekuatan dari luar yang turut mempengaruhi, bukan kekuatan utama di kawasan yang telah memiliki akar historis dan cultural yang kuat.

Sebagaimana telah disinggung, terdapat dua negara lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan, yaitu AS dan Russia. Russia memiliki wilayah teritorial di Asia Timur, termasuk wilayah yang diperselisihkan dengan Jepang seperti Gugusan Pulau Kurile dan Pulau Sakhalin, Sementara AS, memiliki keterikatan aliansi dengan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, namun, status AS sebagai negara adidaya menyebabkan konsentrasi politik luar negerinya terpecah ke berbagai kawasan lainnya. Hal tersebut ditunjukkan sikap AS yang mulai member kelonggaran pada Jepang dan Korea Selatan dalam meningkatkan kemampuan militernya secara mandiri melalui berbagai perjanjian, pengurangan pasukan pendudukannya secara berkala di Korea Selatan, dan sikap komprominya dengan Jepang terkait relokasi kedudukan pasukannya di Iwo Jima dan Okinawa. (MULIAWAN, 2015)

Dilema keamanan di kawasan Asia Timur bersumber pada adanya rasa takut dan persepsi ancaman akibat peningkatan kekuatan dan kapabilitas militer Negara-negara

yang ada di kawasan Asia Timur maupun kondisi eksternal berupa setting lingkungan internasional. Korea Utara, Korea Selatan, Jepang melakukan peningkatan kekuatan militer yang didukung pula oleh pola hubungan persahabatan (*amity*) dan permusuhan (*enmity*) antar Amerika Serikat dan Cina, serta bayang-bayang pengaruh Perang Dingin dari Uni Soviet. Rasionalitas pengembangan senjata nuklir dilakukan oleh Korea Utara ketika logika dilema keamanan terjadi. Keadaan dilematis tersebut bagi Korea Utara ditandai dengan polaritas kekuatan, faktor historis dan konstuksi sosial *amity* dan *enmity*. Polaritas kekuatan adalah perbedaan kekuatan militer yang terjadi akibat jalinan aliansi keamanan Amerika Serikat yang akhirnya memperkuat kapabilitas militer Korea Selatan dan Jepang.

Aktor-aktor tersebut berupaya keras dengan mengandalkan kerja sama untuk menyinergikan berbagai sumber daya dan kekuatan untuk meraih kepentingan dan mempertahankan kekuasaan. Namun ironisnya, strategi yang diterapkan negara-negara di kawasan Asia Timur, justru menghidupkan kondisi dilema keamanan di kawasan yang menghambat keberlangsungan proses perdamaian di kawasan. Selain itu, polaritas kekuatan terlihat pula dari peningkatan anggaran militer dan persenjataan yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor historis serta konstuksi sosial *amity* dan *enmity* menjadi faktor lain dalam pembentuk logika dilema keamanan bagi Korea Utara. Kondisi masa lalu ketika Perang Korea, Perang Dingin dan pasca serangan 11 September telah mengakibatkan Korea Utara selalu merasa semakin terancam oleh agresi dan invasi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Kekhawatiran itu semakin bertambah karena rasa curiga di antara negara-negara kawasan akibat adanya pola permusuhan (*enmity*) antar negara kawasan dan minimnya kerangka kerja sama kawasan yang mendorong negara-negara untuk meningkatkan kekuatannya akibat rasa curiga dan hal ini secara langsung telah memperlemah pertahanan militer negara lain.

Rasionalitas Korea Utara muncul ketika Korea Utara menganggap ancaman keamanan dari Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan membahayakan keamanan domestik sehingga Korea Utara berusaha melakukan pengembangan senjata nuklir untuk meningkatkan teknologi pertahanan serta mengimbangi keunggulan militer negara - negara lain di Asia Timur. Saat dihadapkan pada kondisi keamanan yang dilematis akibat gangguan eksternal, rasionalitas strategi pengembangan senjata nuklir memiliki kemampuan efektif untuk menyeimbangkan kekuatan dan menangkal ancaman eksternal.

Di satu sisi, pengembangan senjata nuklir mengakibatkan reaksi berantai yang meningkatkan tensi keamanan di Asia Timur. Perlombaan senjata, pada akhirnya, merupakan realitas yang tidak dapat dihindarkan. Pembangunan senjata militer, baik senjata nuklir maupun senjata konvensional, akan saling mempengaruhi kebijakan negara-negara di kawasan. Di sisi lain, jaminan keamanan Amerika Serikat terhadap Jepang dan Korea Selatan juga tidak memberikan kepastian akan mampu menangkal serangan Korea Utara. Dengan demikian, sangat masuk akal bagi Jepang dan Korea Selatan untuk meningkatkan pertahanan atau kapabilitas militer. Tindakan Jepang dan Korea Selatan, kemudian, dianggap sebagai ancaman kembali bagi Korea Utara. Pada akhirnya, siklus dilema keamanan akan terus terjadi dan tidak berhenti di kawasan Asia Timur. Dilema keamanan tersebut akan menciptakan dinamika perlombaan senjata yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas keamanan Asia Timur. (Syahrin, 2018)

Selain itu adanya konflik di semenanjung Korea yang juga ditengarai telah mempengaruhi situasi keamanan internasional karena beberapa alasan, yaitu : Pertama, isu yang beredar dalam konflik ini merupakan isu yang sangat diwaspadai di dunia internasional, yaitu pengembangan senjata nuklir. Proyek nuklir ini seperti menjadi babak baru dari

konflik Semenanjung Korea, karena proyek ini kemudian menjadi perhatian berbagai negara-negara di berbagai belahan dunia, dan menjadi sebuah Security Dilemma dikawasan tersebut. Perhatian ini terpusat pada kekhawatiran akan terjadinya isu pengembangan senjata nuklir baru oleh Korea Utara seperti bom yang kemudian dikategorikan sebagai tanda ancaman bagi negara-negara super power seperti AS, Jepang, Uni Eropa, dan negara lainnya. Dalam hal ini Korea Utara mendapat peringatan keras dari PBB untuk tidak sembarangan meluncurkan nuklirnya, karena dianggap mengganggu keamanan negara lain. Amerika yang bisa dikatakan adalah negara yang paranoid, mulai ikut membangun kekuatannya di Asia Timur. Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki Jepang yang bisa dijadikan bentengnya di Asia Timur. Amerika yang memiliki pangkalan di Okinawa, berusaha untuk menjaga keamanan regional di Asia Timur, jika dilihat dari sudut pandang wilayahnya, kehadiran Amerika Serikat menunjukkan bahwa konflik di Semenanjung Korea ini sudah mengganggu keamanan internasional.

B. Ancaman Keamanan Korea Utara Terhadap Jepang

Menjadi negara maju tidak lantas membuat Jepang menjadi negara yang aman – aman dan bisa hidup secara damai tanpa ada permasalahan. Namun berbagai ancaman bisa muncul darimana saja, termasuk dari negara – negara disekitar Jepang seperti Korea Utara dan China. Dan disisi lain sistem keamanan Jepang atau militer Jepang bisa dikatakan tidak bisa bekerja dengan sempurna karena Jepang sendiri keamanannya berada dibawah bayang – bayang Amerika Serikat, sehingga jika terjadi sesuatu pada Jepang, maka mau tidak mau Jepang harus meminta bantuan pada Amerika Serikat.

Berada di wilayah yang strategis menyebabkan Jepang berada pada posisi tidak bisa lepas dari adanya ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu seperti halnya ancaman nuklir dari Korea Utara ataupun dinamika konflik

dari Laut China Selatan. Perebutan wilayah di Laut Cina Selatan antara negara pihak akan mengakibatkan ketidakstabilan keamanan di kawasan yang dapat berujung pada konflik terbuka. Pada dasarnya situasi di Laut China Selatan sekarang ini tidak stabil bahkan kawasan ini telah menjadi ajang perebutan wilayah oleh beberapa negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Kawasan ini pada dasarnya memiliki topografi dan potensi yang sangat krusial bagi negara-negara pantai di Laut China Selatan. Sehingga dari topografi dan potensi tersebut, kawasan ini menjadi sebuah kawasan yang sangat sensitif dan memicu sebuah konflik.

Di sisi lain, Korea Utara dalam kesempatan yang berbeda meyakinkan bahwa Korea Utara mengembangkan nuklir hanya untuk menginginkan jaminan keamanan dari adanya kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan negara aliansinya di Asia Timur, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Karena dampak dari program nuklir Korea Utara tersebut membuat beberapa negara di kawasan Asia Timur mulai mengantisipasi terhadap hal-hal yang dapat merugikan Negara-nya khususnya Jepang dan Korea Selatan, kekhawatiran ini sangat beralasan karena dampak dari meningkatnya program nuklir Korea Utara semakin meningkatkan intensitas konflik lama antara Korea Utara dan Korea Selatan. Hal ini sesuai dengan pandangan Jepang tentang kondisi di kawasan Asia Timur pasca berakhirnya perang dingin, seperti pecahnya Korea menjadi dua menjadi Korea Utara dan Korea Selatan yang saling bermusuhan dan terus meningkatkan kekuatannya. Perilaku Korea Utara yang semakin sulit untuk diprediksi oleh perhitungan normal akibat terisolirnya Negara tersebut. Keadaan ini membawa Jepang harus menghadapi masalah penculikan warganya oleh Korea Utara serta mengantisipasi program nuklir Korea Utara.

Presiden Kim Jong-un dalam pernyataan menyambut tahun baru 2017, menegaskan keinginannya untuk berupaya

memperkuat kapabilitas militer negaranya, pernyataannya tersebut adalah :

"We Should channel our efforts into increasing the nation's defense capability to cope with the aggressive provocations of the enemy. We should implement the policy of turning the entire army into an army of cadres, modernizing the whole army, arming all the people and fortifying the whole country, thereby strengthening the revolutionary armed force and further solidifying the all-people defense system".

(Kita harus berupaya bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional untuk menangkal provokasi-provokasi agresif dari negara musuh. Kita harus dapat mengimplementasikan kebijakan mengenai kaderisasi tentara, modernisasi persenjataan, mempersenjatai seluruh rakyat dan memperkuat pertahanan di berbagai pelosok negara, dengan demikian kita dapat memiliki angkatan bersenjata yang lebih kuat dan memiliki sistem pertahanan rakyat yang lebih solid) (Kusnendar, 2017)

Peningkatan kapabilitas militer Korut merupakan salah satu kebijakan dan strategi militer yang diambil pemerintah Korut menghadapi isolasi dunia internasional terhadap Korut. Diharapkan dengan peningkatan kapabilitas militer tersebut Korut dapat memiliki posisi yang cukup kuat dalam mempertahankan keamanan dalam negerinya dari tekanan-tekanan dunia internasional. Disamping itu dengan peningkatan kapabilitas militernya Korut mampu membuktikan kepada dunia luar bahwa Korut memiliki kekuatan dan kemampuan militer yang kuat yang dapat menjadi ancaman berbahaya bagi negara-negara yang

memusuhinya. Hal ini lah yang membuat Jepang semakin waspada terhadap Korea Utara. Seperti kita ketahui bahwa Jepang dan Korea Utara memiliki hubungan yang dapat dikatakan tidak baik. Hingga saat ini Jepang dan Korea Utara tidak memiliki Hubungan Diplomatik, hal ini dikarenakan Jepang hanya mengakui kedaulatan wilayah Korea Selatan saja, tidak mengakui kedaulatan wilayah Korea Utara. Untuk itu Korea Utara semakin menjadi jadi dalam hal melangsungkan ancamannya terhadap Jepang. Secara umum ada beberapa residu yang memperkuat ancaman yang ditunjukkan oleh Korea Utara terhadap Jepang, diantaranya yaitu :

1. Kasus Penculikan Korea Utara Terhadap Warga Jepang

Isu penculikan merupakan isu yang mengancam keamanan nasional Jepang. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, banyak warga Jepang yang menghilang secara tidak wajar. Berbagai investigasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dan testimoni dari agen Korea Utara yang telah ditangkap menunjukkan adanya kemungkinan yang kuat bahwa kasus penculikan ini dilakukan oleh Korea Utara. Sejak tahun 1991, pemerintah Jepang selalu menyampaikan kasus ini pada setiap kesempatan yang ada. Namun Korea Utara selalu mengelak keterlibatan mereka. Pada pertemuan antara Japan-DPRK (The Democratic People's Republic of Korea) yang dilaksanakan September 2002, Kim Jong Il mengakui untuk pertama kalinya bahwa Korea Utara telah menculik warga Jepang. Korea Utara meminta maaf dan berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut serta mencegah untuk terjadinya hal yang serupa di masa depan. (5 Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018)

Korban penculikan yang telah diidentifikasi oleh Pemerintah Jepang. (rachi.go.jp, 2011)

Tabel 2.1 Daftar Nama Warga Jepang Yang Diculik Oleh Korea Utara
--

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Waktu Penculikan
1.	Yutaka Kume	52	Laki – laki	19 September 1977
2.	Kyoko Matsumoto	29	Perempuan	21 Oktober 1977
3.	Megumi Yokota	13	Perempuan	15 November 1977
4.	Minoru Tanaka	28	Laki – laki	Juni 1978
5.	Yaeko Taguchi	22	Perempuan	Juni 1978
6.	Yasushi Chimura	23	Laki – laki	7 Juli 1978
7.	Fukuie Chimura	23	Perempuan	7 Juli 1978
8.	Kaoru Hasuike	22	Perempuan	31 Juli 1978
9.	Yukiko Hasuike	22	Perempuan	31 Juli 1978
10.	Shuici Ichikawa	23	Laki – laki	12 Agustus 1978
11.	Rumiko Masumoto	24	Perempuan	12 Agustus 1978
12.	Hitomi Soga	19	Perempuan	12 Agustus 1978
13.	Miyoshi Soga	46	Perempuan	12 Agustus 1978
14.	Toru Ishioka	22	Laki – laki	Mei 1980
15.	Kaoru Matsuki	26	Laki – laki	Mei 1980
16.	Tadaaki Hara	43	Laki – laki	Juni 1980
17.	Keiko Arimoto	23	Perempuan	Juli 1983

.Sumber: Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2018.

Di Jepang, terdapat beberapa kampanye yang aktif menyuarakan untuk menyelamatkan para korban penculikan. Pada tahun 1997 didirikan The Association of the Families of Victims Kidnapped by North Korea yang membuat petisi dari 10 juta orang (hingga April 2013) dan petisi tersebut telah diserahkan kepada Perdana Menteri Jepang. Selain itu, pada Januari 2013 Pemerintah Jepang membentuk “Headquarters for the Abduction Issue” yang meliputi semua menteri negara yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai pendekatan strategis dan komprehensif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Perdana Menteri, Shinzo Abe, berperan sebagai pemimpin *The Head and Minister of State for the Abduction Issue*, sedangkan *The Chief Cabinet Secretary* dan *The Foreign Minister* berperan sebagai deputi. (rachi.go.jp, 2011)

2. Ancaman Nuklir Korea Utara Terhadap Jepang

Selain isu penculikan, isu senjata pemusnah masal atau nuklir menjadi ancaman yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Jepang. Korea Utara, negara yang berada sangat dekat dengan Jepang, hingga saat ini telah mengembangkan senjata nuklirnya. Untuk mencari solusi damai atas program pengembangan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara, maka terbentuklah suatu perundingan yaitu *The Six Party Talks* di antara enam negara yaitu Korea Utara, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan Jepang. Perundingan ini terbentuk dikarenakan pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT). Sejak tahun 2003 hingga 2007 telah diadakan enam kali perundingan namun tidak menghasilkan jalan terang dikarenakan Korea Utara yang terus melakukan tes misil dan provokasi-provokasi. Korea Utara beberapa kali bersedia untuk meredam tindakannya namun hal ini berakhir pada jalan buntu ketika pada tahun 2009, Korea Utara memutuskan untuk keluar dari perundingan ini. Pada akhir tahun 2012 Korea Utara kembali meluncurkan misil jarak jauhnya dan beberapa uji coba nuklir lainnya pada awal tahun 2013 hingga saat ini.

Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir dan rudal Korea Utara (Korut) masih tetap menjadi ancaman yang serius dan nyata bagi keamanan Jepang. Bahkan Korut juga secara signifikan merusak perdamaian dan keamanan kawasan dan komunitas internasional. Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe menyatakan kemampuan nuklir Korea Utara sangat tidak bisa diterima. Ia juga melihat situasi keamanan yang dihadapi Jepang saat ini merupakan yang terburuk sejak Perang Dunia II. Perdana Menteri Shinzo Abe mendesak masyarakat Internasional untuk bersama-sama menekan Korut dalam upaya untuk memaksa rezim yang ada agar menyerah dengan ambisi nuklirnya. (Oktaviani, 2018)

a. Pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara

Korea Utara memutuskan untuk mengaktifkan kembali pusat nuklir Yongbyon pada tahun 2002, membongkar penyekat dan kamera-kamera pemantauan yang dipasang oleh Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) yang sebelumnya digunakan untuk memverifikasi bahwa reaktor nuklir di tempat itu tidak dijalankan sesuai dengan persetujuan yang ditandatangani tahun 1994 antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Korea Utara merupakan salah satu negara yang melakukan perkembangan senjata nuklir dan juga negara ke-9 dalam jajaran pemilik senjata nuklir didunia setelah Amerika, Perancis, Rusia, Inggris, China, India, Pakistan dan Israel. (Kompas, 2006)

Di kawasan Asia Timur dan Semenanjung Korea tantangan-tantangan keamanan dan ekonomi politik masuk dalam daftar peringkat atas utamanya adalah masalah ancaman senjata nuklir dan senjata-senjata pemusnah massal dari Korea Utara. Faktor pertama yang menciptakan kondisi dilema keamanan bagi Korea Utara adalah polaritas kekuatan antarnegara di kawasan. Ketika suatu negara tidak bisa mengikuti dinamika keseimbangan atas polaritas kekuatan tersebut, maka negara tersebut rentan menjadi sasaran dominasi dan ekspansi negara lain.

Polaritas kekuatan yang tidak seimbang ini menunjukkan terdapatnya distribusi kekuatan yang tidak merata di antara negara-negara di kawasan dan negara aliansi. Pertumbuhan dan akselerasi sistem persenjataan negara-negara kawasan Asia Timur terus meningkat. Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak secara langsung menurunkan kecenderungan tensi peningkatan anggaran militer di kawasan Asia Timur. Hampir semua negara di kawasan Asia Timur tetap meningkatkan pembangunan kekuatan militer tanpa terpengaruh peristiwa penting tersebut. Kemajuan ekonomi dan respon terhadap konflik di kawasan

merupakan faktor yang menyebabkan negara-negara di kawasan Asia Timur tetap meningkatkan anggaran militer masing-masing. (Syahrin, 2018)

Upaya-upaya Korea Utara Menciptakan senjata nuklir membuat Kawasan Asia Timur, Amerika Serikat dan bahkan seluruh komunitas internasional menghadapi tantangan keamanan yang sangat serius. Upaya-upaya diplomasi dan pertemuan-pertemuan khusus merupakan alat utama untuk dapat bernegosiasi dengan Korea Utara, tapi keberhasilan yang didapat juga sangat sedikit. Pilihan kebijakan alternatifnya berupa isolasi dan pengurangan serangan militer.

Situasi internal yang meningkat di Korea Utara akan menciptakan ancaman Internasional akan nuklir Korea Utara, ditambah dengan pengakuan dari Korea Utara sendiri atas kepemilikan senjata nuklir. Korea Utara tidak ada pilihan lain kecuali menolak untuk mengikuti pertemuan segi enam tanpa batas waktu, selama Amerika Serikat mencela Korea Utara sebagai rezim yang kejam dan membuat system semaunya. Selain itu Pyongyang merasa perlu untuk mengakui bahwa mereka telah mempunyai senjata nuklir, dan ingin meningkatkan kemampuan senjatanya untuk menjaga rezim komunis itu. Meskipun Korea Utara masih menyatakan keinginan bebas nuklir di Semenanjung Korea melalui dialog baru-baru ini. (Kompas, 2006)

Pernyataan Korea Utara tentang senjata nuklir dan penolakan mereka untuk mengikuti pertemuan segi enam itu kembali meningkatkan ketegangan, dan secara tidak langsung menjadi penghalang untuk terciptanya stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea.

Keamanan Semenanjung Korea sendiri pada dasarnya di pengaruhi oleh empat hal:

1. Rivalitas global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

2. Keseimbangan regional antara keempat kekuatan Asia Timur : Jepang, China, Korea Utara dan Korea Selatan.
3. Konfrontasi lokal Korea Utara-Selatan.
4. Politik dalam negeri kedua Korea.

Secara historis Semenanjung Korea sejak dulu menjadi wilayah yang diperebutkan diantara negara-negara tetangganya. Posisi geografis Korea yang terletak pada posisi lintang 35° U – 40° U dan 125° Tenggara – 130° Timur, serta berbatasan dengan China dan Rusia di sebelah Utara dan dengan Jepang di sebelah Selatan, menjadikan Semenanjung Korea sebagai “Jembatan Penyeberangan” hubungan diantara negara-negara tetangganya tersebut dan penyebaran budaya China ke Jepang. Hal ini yang membuat keberadaan Semenanjung Korea memberikan keuntungan strategis bagi pihak-pihak yang bisa menguasai wilayah ini.

Sebagai negara yang tidak berada dalam posisi yang menguntungkan, tidaklah heran bahwa Korea Utara bersikeras untuk mempertahankan program pengembangan senjata nuklirnya. Menurut Young Sun Song mengungkapkan bahwa secara garis besar alasan Korea Utara untuk tetap mempertahankan program pengembangan senjata nuklir adalah :

1. Melindungi eksistensi komunisme sebagai satu-satunya ideologi negara.
2. *Balance Of Power* terhadap kekuatan politik dan militer AS di Korea Selatan dan Jepang.
3. Sebagai “Kartu Nuklir” dalam negosiasi dengan negara lain.
4. Memperoleh pengakuan dan perhatian dari dunia internasional dan untuk dapat membina hubungan dengan Amerika Serikat.

Perundingan enam negara mengenai krisis nuklir Korut gagal mencapai kesepakatan, atau dengan kata lain perundingan itu tetap jalan di tempat. Korea Utara

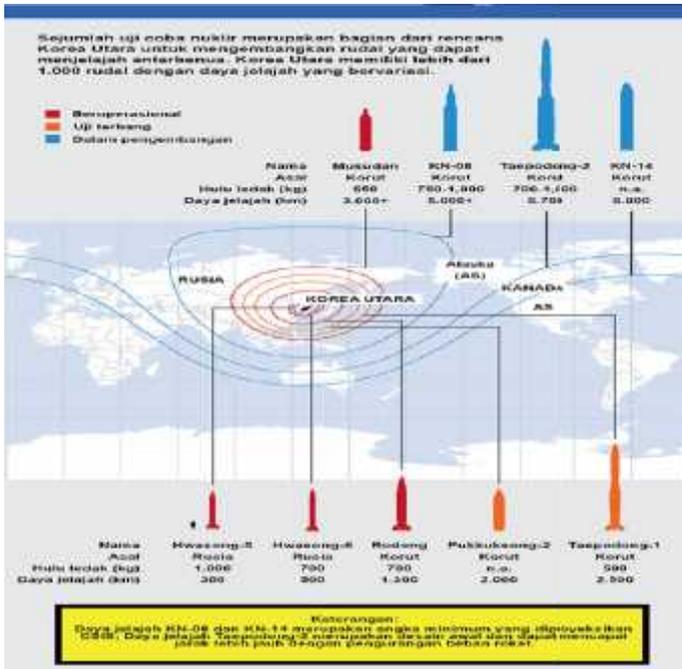
menginginkan jaminan keamanan, sementara AS menginginkan diakhirinya program senjata nuklir, selain itu Pyongyang juga menginginkan hubungan diplomatik dengan AS dan sebuah kesepakatan damai, selain jaminan keamanan dan bantuan ekonomi. Sementara itu AS ingin Korut menghentikan seluruh pengembangan misil balistik Korut dan memperbaiki catatan HAM hak asasi manusianya.

Masa depan perdamaian dikawasan Asia Timur ini masih diwarnai dengan ketidakpastian dalam penyelesaian konflik-konflik yang terjadi. Terutama dalam pertikaian dua Korea. Ditambah lagi dengan munculnya isu nuklir Korea Utara yang cukup merisaukan dan dapat memicu perlombaan senjata dan juga menjadi faktor yang kerap disebut-sebut sebagai ancaman bagi terbentuknya tata regional baru yang berisikan perdamaian dan kerjasama.

Runtuhnya Uni Soviet ini membuat masalah keamanan menjadi isu sentral tapi Korea Utara untuk menghadapi masalah yang muncul dari perubahan yang terjadi pasca Perang Dingin. Korea Utara memerlukan suatu tindakan alternatif untuk dapat mempertahankan sistem politiknya. Korea Utara berusaha untuk menutupi disparitas kekuatan ini dengan mengembangkan program senjata nuklir sendiri. Melihat situasi dan kondisi tersebut Amerika Serikat tidak tinggal diam karena merasa kepentingan nasibnya terancam. Oleh karena itu juga kawasan Asia Timur dapat terganggu dengan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. (Resmi, 2007)



Gambar 2.1 Cara Kerja Rudal Balistik Antar Benua
Sumber: (BBC, 2017)



Gambar 2.2 Data Rudal Yang Dimiliki Oleh Korea Utara
 Sumber: The Republic of Korea Ministry of National Defense, 2016.

b. Kebijakan Nuklir dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un

Korea Utara kembali menjadi focus perhatian Internasional dengan program nuklirnya. Untuk membatalkan program tersebut, Amerika Serikat bersama dengan Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok berupaya untuk membujuk Korea Utara agar segera menghentikan keberlanjutan program nuklirnya. Program nuklir ini dinilai akan berdampak pada munculnya bencana besar seperti kelaparan, kesengsaraan dan kematian. Atas sikap ini, akhirnya Korea Utara kembali mengalami banyak tekanan dan reaksi keras dari dunia internasional atas pengembangan nuklirnya terutama sejak

dilakukan uji coba nuklirnya pada tahun 2004. Meskipun demikian, reaksi dan tekanan internasional tidak menjadikan surut pada aksi nekatnya. Korea Utara beranggapan bahwa sebagai negara kecil yang memiliki banyak keterbatasan, ia membutuhkan suatu strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya, termasuk geliat untuk melakukan pengembangan nuklirnya.

Tidak banyak yang dapat dijelaskan mengenai kebijakan nuklir di bawah pemerintahan Kim Jong Un karena waktu pemerintahannya yang masih sangat singkat. Memang Kim Jong Un telah mengeluarkan beberapa kebijakan tentang nuklir, namun hingga kini belum terdapat kebijakan yang sangat spesifik terkait dengan keikutsertaan Korea Utara dalam rezim NPT. *The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) adalah sebuah perjanjian internasional yang mengatur mengenai penggunaan senjata nuklir di dunia. Semua anggota perjanjian ini dilarang untuk memperjual belikan, mengembangkan, maupun membantu pengembangan senjata nuklir.

Pengembangan nuklir diperbolehkan untuk beberapa pengecualian seperti pengembangan energi dan pendidikan, namun hal tersebut harus dilakukan di bawah pengawasan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Lebih jauh lagi, perjanjian ini memiliki tujuan untuk mewujudkan pelucutan senjata secara keseluruhan (disarmament) yang dimulai dari penurunan ketegangan internasional serta rasa saling percaya satu sama lain. (un.org, 2015)

c. Uji Coba Nuklir Korea Utara

Kerjasama Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang tersebut diarahkan untuk menekan Korea Utara secara politis, sehingga Korea Utara dapat memenuhi keinginan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Timur guna menghentikan program pengembangan nuklir dan mentaati seluruh peraturan

yang ditetapkan dalam CTBT dan NPT, sekalipun Korea Utara telah keluar dari perjanjian NPT sebagai bentuk perlawanan Korea Utara dari tekanan internasional. Kekhawatiran Jepang atas program nuklir Korea Utara juga tidak terlepas dari pengalaman traumatik Jepang atas kehancuran Jepang pada Perang Dunia ke II, di mana Jepang mengalami kehancuran total secara fisik, bencana kemanusiaan, runtuhnya roda perekonomian serta polusi kimia nuklir yang masih terasa sampai saat ini, selain faktor traumatik tersebut, Jepang juga terikat dengan konstitusi yang isinya memuat pembatasan militer Jepang pasca berakhirnya Perang Dunia II. Berdasarkan konstitusi (pasal 9), secara resmi Jepang dilarang memiliki kekuatan militer, karena perlindungan keamanannya berada dibawah naungan Amerika Serikat terutama yang berkaitan dengan invansi dari luar. Jepang juga dilarang memiliki atau menggunakan nuklir sebagai mesin perang .

Kegiatan dan ujicoba tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa "*First Military Policy*" sebagai doktrin utama politik luar negeri Korea Utara tetap tidak berubah. Meskipun Kim Jong-un baru berusia 27 tahun ketika dia pertama kali berkuasa dan hanya memiliki sedikit waktu untuk mempersiapkan pemerintahannya, kemampuan Kim Jongun dalam melakukan modernisasi sistem persenjataan Korea Utara sangat efektif. Setelah uji coba nuklir yang dilakukan pada Oktober 2006 dan Mei 2009 di masa pemerintahan Kim Il-sung, Kim Jong-un hanya dalam kurun waktu 3 tahun, yaitu sejak Februari 2013 dan Januari 2016 telah melakukan dua kali uji coba nuklir. Intensitas pengujian nuklir yang dilaksanakan pada tahun 2013 dan 2016 menunjukkan bahwa senjata nuklir merupakan identitas kelangsungan rezim Korea Utara.

Ketegangan terus terjadi akibat pengembangan senjata nuklir Korea Utara di kawasan Asia Timur. Pada 3 September 2017, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang kelima dan pada 15 September 2017, Korea Utara

menembakkan rudal balistik jarak menengah ke perairan Jepang di kawasan Pasifik. Rudal ini dilaporkan bisa mencapai jarak 3.700 kilometer yang membuat wilayah pangkalan militer Amerika Serikat di Guam berada dalam jangkauan senjata Korea Utara.

Seperti diketahui, pada 15 September 2017, Korea Utara kembali menembakkan rudal ke arah timur melewati wilayah udara Hokkaido, Jepang utara dan jatuh di Samudera Pasifik. Sebelumnya, rudal jarak menengah Hwasong-12, juga ditembakkan oleh Korea Utara melewati Jepang. Rudal terbang melintasi wilayah udara Jepang dan jatuh di Samudera Pasifik hingga memicu kepanikan warga di Jepang utara, pada 3 September 2017. (Yasinta, Kompas, 2018). Pemerintah Jepang bahkan menghimbau kepada masyarakatnya untuk mencari perlindungan. Maka hal tersebut secara tidak langsung menjadi salah satu ancaman bagi Jepang. Bahkan tidak hanya Jepang saja negara – negara lain pun mengancam tindakan dari Korea Utara tersebut. Berbagai protes juga dilayangkan kepada Korea Utara, namun disini negara yang paling merasa dirugikan adalah Jepang dimana Jepang merupakan negara yang masih satu kawasan dengan Korea Utara. Atas tindakan dari Korea Utara tersebut berbagai sanksi juga telah diberikan kepada Korea Utara. Namun hal tersebut hanya bersifat sementara dan kembali dilakukan oleh Korea Utara. (bbc, 2017)

Jepang menyatakan bahwa senjata nuklir dan rudal Korea Utara (Korut) masih tetap menjadi ancaman yang serius dan nyata bagi keamanan Jepang. Bahkan Korut juga secara signifikan merusak perdamaian dan keamanan kawasan dan komunitas internasional. Hal tersebut disampaikan dalam tinjauan pertahanan tahunan Jepang yang baru saja dirilis. Ini merupakan tinjauan tahunan pertama sejak mencairnya ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam tinjauan tahun 2018 tersebut juga disorot mengenai kebangkitan China sebagai kekuatan militer. Disebutkan bahwa Beijing telah memicu

"kekhawatiran keamanan yang kuat di wilayah dan komunitas internasional, termasuk Jepang". (hutapea, 2018)

Jepang menganggap Korea Utara sebagai ancaman bagi keamanannya. Meski Korea Utara sudah menghentikan uji peluru kendali dan nuklirnya, nyatanya mereka masih melakukan kegiatan militer di Semenanjung Korea, yang dianggap membahayakan Jepang. Bahkan Jepang beranggapan bahwa kegiatan militer yang dilakukan oleh Korea Utara merupakan ancaman yang sangat serius serta sangat menekan Jepang. Ancaman tersebut bersifat nyata bagi Jepang, sehingga Jepang dengan Amerika Serikat semakin memperkuat aliansinya untuk mencegah Korea Utara agar tidak bertindak semaunya sendiri. Bahkan Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim sejumlah kapal perangnya ke Jepang untuk mengantisipasi rencana uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara, dan kapal – kapal yang dikirimkan oleh Amerika tersebut sengaja mengitari semenanjung Korea. Sehingga kerja sama militer antara Jepang dan Amerika Serikat semakin menguat dimana Amerika Serikat dan juga Jepang juga berusaha untuk menekan Korea Utara agar tidak bertindak dengan apa yang mereka mau terutama terkait nuklir dan rudalnya. (Setiawan, 2017)

Pada prinsipnya, hal ini terlihat seperti kondisi keamanan yang kompatibel. Artinya, antar negara baik Amerika Serikat dan negara aliansinya (Jepang dan Korea Selatan) tidak pernah secara langsung akan mengancam keamanan Korea Utara, mereka hanya menginginkan agar Korea Utara berhenti untuk mengembangkan program senjata nuklir yang dinilai sangat mengancam stabilitas keamanan kawasan. Sehingga semakin lama keamanan di Semenanjung Korea menjadi lebih semakin lebih kompleks dan dilematis. (Fearon, 2017)

Uji Coba Nuklir Korea Utara :

1. Oktober 2006

Pyongyang melakukan uji ledak senjata nuklir pertamanya di sebuah terowongan di daerah pegunungan terpencil di timur laut Punggye-ri. Tes tersebut menghasilkan ledakan sekitar satu kiloton atau 1.000 ton dan memicu kecaman internasional. Dampak lainnya, terjadi getaran gempa yang tercatat Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) berkekuatan 4,2 Skala Richter (SR) di Semenanjung Korea. Uji senjata nuklir ini terjadi di era Kim Jong-il, ayah pemimpin Korut yang sekarang Kim Jong-un.

2. Mei 2009

Pyongyang melakukan uji coba senjata nuklir keduanya. Sama seperti uji ledak pada tahun 2006, tes kedua juga dilakukan situs di bawah tanah. USGS menyatakan bahwa tes senjata nuklir tersebut menyebabkan gempa berkekuatan 4,7 SR di daerah Kilju di timur laut negara tersebut. Ledakan tersebut diperkirakan menghasilkan ledakan dua sampai delapan kiloton. Ledakan itu terasa di area yang berjarak lebih dari 200 km di kota perbatasan China, Yanji. Tes senjata nuklir ini juga terjadi di era Kim Jong-il, ayah Kim Jong-un

3. Februari 2013

Korea Utara melakukan tes ketiga senjata nuklirnya, namun baru yang pertama di era Kim Jong-un. Tes ini jauh lebih besar dari dua ledakan sebelumnya, di mana para ahli memperkirakan bom nuklir yang diledakkan berkekuatan enam hingga tujuh kiloton. Korea Utara mengatakan bahwa pihaknya menggunakan perangkat nuklir miniatur dan ringan dengan kekuatan ledakan lebih besar dari sebelumnya. Para ahli di Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kala itu mencatat getaran gempa buatan di daerah Punggye-ri berkekuatan antara 4,7 SR hingga 5,2 SR.

4. Januari 2016

Korea Utara mengaku melakukan tes nuklir keempat jenis miniatur bom hidrogen. Dampak tes senjata ini menimbulkan getaran gempa 5,1 SR yang terdeteksi sekitar 50km dari Kota Kilju, dekat situs nuklir Punggye-ri. Para ahli memperkirakan bom itu berkekuatan antara empat hingga enam kiloton.

5. September 2016

Uji coba kelima ini menimbulkan getaran gempa berkekuatan 5,3 SR. Kekuatan ledakan sekitar 10 kiloton, atau 10 kali lebih kuat dari pada uji coba senjata nuklir yang sebelumnya. Getaran gempa terdeteksi di dekat lokasi uji coba nuklir bawah tanah Punggye-ri seperti sembilan bulan sebelumnya.

6. September 2017

Setahun berlalu, rezim Kim Jong-un kembali menguji coba senjata nuklir pada hari Minggu (3/9/2017). Kali ini merupakan yang terkuat sepanjang uji coba yang dilakukan negara itu, di mana terjadi getaran gempa berkekuatan 6,3 Skala Richter. Getaran gempa terdeteksi di daerah Kilju, tempat lokasi uji coba nuklir Punggye-ri. Tes nuklir jenis bom hidrogen ini menjadi yang pertama bagi pemerintah Presiden Donald Trump. Kekuatannya diklaim mencapai 100 kiloton, yang lebih kuat dari bom atom yang pernah dijatuhkan AS di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang, di akhir Perang Dunia II. (Muhaimin, 2017)

Pada bab II ini penulis menjelaskan tentang keterlibatan Jepang pada Perang Dunia II, dimana keterlibatan pada Perang Dunia II tidak berujung pada kemenangan melainkan Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II, sehingga karena kekalahan Jepang tersebut memberikan dampak terhadap Jepang, dimana Jepang tidak diperbolehkan

untuk memiliki militer sendiri. Karena Jepang tidak memiliki militer, maka Jepang beraliansi dengan Amerika untuk menjaga pertahanan negaranya dari ancaman – ancaman yang bisa saja dilakukan oleh negara tetangga Jepang itu sendiri. Seperti halnya pada bab II ini juga dipaparkan ancaman – ancaman dari Korea Utara yang ditunjukkan terhadap Jepang. Sehingga Jepang berupaya untuk menangkal ancaman tersebut dengan memperkuat kerja sama militernya dengan Amerika Serikat serta membentuk kerja sama Trilateral antara Jepang – Amerika Serikat – Korea Selatan yang akan dibahas lebih lanjut pada bab III.